

---

**Pengaruh Kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Kinerja Guru Bersertifikasi di Madrasah Aliyah, Ma'had Al-Zaytun, Kecamatan Gantar, Indramayu**

**Marlinda<sup>1</sup>, Mukarto Siswoyo<sup>2</sup>, Arief Prayitno<sup>2</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Indonesia, Email: [marlinda2401@gmail.com](mailto:marlinda2401@gmail.com)

Received: June 11, 2023; In Revised: July 29, 2023; Accepted: August 29, 2023

**Abstrak**

Penilaian kinerja guru sangat diperlukan untuk mengetahui kualitas guru dalam meningkatkan mutu mutu pendidikan. Surat Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 menyebutkan bahwa satu diantara syarat gaji yang dapat dibayarkan dari anggaran BOS adalah tidak mendapatkan tunjangan profesi guru. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kebijakan pemerintah tentang pemberian dana, kinerja guru bersertifikasi di MA Ma'had Al-Zaytun Gantar, dan pengaruh pemberian dana BOS terhadap kinerja guru bersertifikasi di MA Ma'had Al-Zaytun Gantar Indramayu. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan 40 orang responden. Pengujian hipotesis statistic menggunakan statistik regresi linier sederhana yang dilanjutkan dengan uji parsial (uji t) dan uji determinasi ( $R^2$ ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable kebijakan pemberian dana BOS berpengaruh secara signifikan sebesar 0,043 terhadap kinerja guru bersertifikasi di MA Ma'had Al-Zaytun. Berdasarkan uji determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan angka prosentase sebesar 0,104 terhadap kinerja guru bersertifikasi, yang berarti bahwa kebijakan pemberian dana BOS memberikan pengaruh sebesar 10,4% terhadap kinerja guru bersertifikasi. Berdasarkan penelitian ini, besar harapan pemerintah meninjau ulang dalam memberikan kebijakan pemberian honor kepada guru bersertifikasi sehingga honor guru bersertifikasi non PNS mencapai tingkat UMP yang berlaku didaerah tersebut.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Dana BOS, Sertifikasi, Kinerja Guru.

**Abstract**

*Teacher performance assessment is very necessary to determine the quality of teachers in improving the quality of education. Permendikbudristek Letter Number 63 of 2023 states that one of the conditions for salaries that can be paid from the BOS budget is not receiving professional teacher allowances. The aim of this research is to analyze government policies regarding the provision of funds, the performance of certified teachers at MA Ma'had Al-Zaytun, and the influence of providing BOS funds on the performance of certified teachers at MA Ma'had Al-Zaytun. The method used in this research is a quantitative method with using 40 sample respondents based on the Slovin formula calculation. Statistical hypothesis testing uses simple linear regression statistics followed by a partial test (t test) and determination test ( $R^2$ ). The research results show that the policy variable for providing BOS funds has a significant effect of 0.043 on the performance of certified teachers at MA Ma'had Al-Zaytun. Based on the determination test ( $R^2$ ) it shows a percentage figure of 0.104 on the performance of certified teachers, which means that the policy of providing BOS funding has an influence of 10.4% on the performance of certified teachers. Based on this research, it is hoped that the government will review the policy of providing honorariums to certified teachers so that the honorarium for non-PNS certified teachers reaches the UMP level applicable in the area.*

**Keywords:** Policy, BOS Funding, Certification, Teacher Performance.

**Pendahuluan**

Hal utama yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan adalah pengembangan sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi serta profesional dalam bidangnya sehingga dapat mencerminkan kualitas dan kuantitas serta kemajuan suatu bangsa dan negara. Sumber daya yang berkualitas dan profesional mampu menciptakan pendidikan yang berkualitas (Munirah, 2015). Komponen-komponen dalam pendidikan nasional, antara lain lingkungan, sarana dan prasarana, sumber daya, dan masyarakat. Komponen tersebut bekerjasama saling terkait dan mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan (Saoetarno, 2004).

Dalam penyelenggaraan pendidikan, guru menjadi satu faktor penentu keberhasilan, sehingga berbagai inovasi pendidikan, khususnya pengembangan kurikulum dan peningkatan sumber daya manusia akan selalu bermuara pada faktor guru. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ditegaskan bahwa guru merupakan pendidik profesional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dengan demikian peningkatan kinerja guru sangat vital dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu lulusan dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Pelayanan dibidang pendidikan yang optimal dan terbaik bagi masyarakat, guru diharapkan memiliki suatu komitmen. Sebab guru menjadi pusat pelayanan dalam pendidikan. Namun, hal tersebut belum dapat terwujud sepenuhnya dalam lingkungan kehidupan guru di masa kini, dikarenakan kesejahteraan guru yang masih banyak belum terpenuhi serta belum merata. Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Andreas, mengatakan bahwa kesejahteraan guru pada umumnya terbagi menjadi 4 kelompok utama. Kelompok pertama adalah guru negeri yang pada umumnya kesejahteraannya cukup baik, khususnya guru berstatus ASN berada di kota besar yang mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Kelompok kedua adalah guru honorer di negeri yang gajinya hanya sebesar upah minimum provinsi dan belum mendapatkan sertifikasi. Tentunya menjadi beban tersendiri, sulit untuk meningkatkan kompetensi dan kinerjanya. Kelompok ketiga adalah guru tetap yayasan yang biasanya sudah mendapat gaji tetap dan sertifikasi, tetapi tidak menerima TKD. Dan yang terakhir adalah kelompok keempat, yaitu guru honorer di swasta. Kelompok inilah yang harus diperhatikan betul oleh pemerintah, mereka hanya mendapat honor dari yayasan yang besarnya tidak seberapa (<https://www.beritasatu.com>).

Keberhasilan penyelenggara pendidikan sangat ditentukan oleh sejauh mana kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan belajar mengajar. Namun demikian, posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh kinerja guru dalam mengajar dan tingkat kesejahteraannya. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru pemerintah telah memprogramkan pemberian tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007.

Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah untuk mengidentifikasi guru berkualitas yang dibuktikan berdasarkan hasil sertifikasi dan dijadikan dasar untuk memberikan tunjangan profesi. Guru yang memperoleh tunjangan profesi dikategorikan sebagai guru profesional. Hal ini yang akan membedakan kinerja guru yang bersertifikasi dan yang belum bersertifikasi. Program sertifikasi guru merupakan program untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya. Pasal 2 Permendiknas Nomor 72 Tahun 2008 menetapkan bahwa guru tetap non-PNS yang memiliki sertifikat pendidik diberikan tunjangan profesi sebesar Rp. 1.500.000,-. Dengan adanya tambahan penghasilan melalui sertifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus profesionalisme guru yang tentunya akan bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya.

Kebijakan lain yang diberikan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru adalah melalui pemberian honor pada program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan prosentase 50% dari total penerimaan dana BOS yang dihitung berdasarkan

jumlah siswa di sekolah. Hal ini diatur dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler. Kebijakan ini menetapkan bahwa penyaluran dana BOS merupakan otonomi sekolah dan dapat digunakan secara fleksibel, termasuk sebagai solusi kesejahteraan guru.

Pembayaran gaji guru honorer yang bersumber dari dana BOS dilakukan bukan tanpa syarat. Yang bersangkutan wajib mempunyai NUPTK atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga kependidikan, serta namanya tercantum dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan) atau EMIS (Education Management Information System) pada sekolah madrasah. Meskipun begitu, guru honorer yang berhak mendapatkan gaji dari dana BOS tetap harus memenuhi persyaratan tertentu. Berdasarkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020, pembiayaan pembayaran honor diberikan kepada guru yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara (non-ASN) dan harus memenuhi tiga persyaratan. Pertama, tercatat pada data pokok pendidikan (dapodik); kedua, belum mendapatkan tunjangan profesi; dan ketiga, memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka.

Kesejahteraan dan profesionalitas guru madrasah bisa dikatakan tidak berbanding lurus. Kebanyakan guru madrasah, khususnya yang mengajar di swasta, meskipun sudah memiliki sertifikat sebagai guru profesional, akan tetapi penghasilan mereka tetap masih dibawah standar penghasilan UMR (Upah Minimum Regional). Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 menyebutkan bahwa UMP minimal adalah Rp. 1.852.009,22 dan UMP tertinggi adalah Rp 4.816.921,17. Indramayu menempati peringkat ke-16 dengan UMP Rp 2.391.567,15. Sementara tunjangan profesional guru madrasah yang diterima bersih setelah di potong pajak adalah Rp 1.425.000,00 per bulan per guru bersertifikasi. Artinya, pendapatan guru bersertifikasi masih di bawah UMR dan UMP terendah di Jawa Barat.

Rendahnya kesejahteraan guru menyebabkan rendah atau bahkan tidak berkualitaskannya pendidikan di Indonesia. Dengan pendapatan yang minim seperti itu berdampak pada banyaknya guru yang bekerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga guru tidak fokus dalam proses pendidikan dalam menyiapkan materi yang akan di sampaikan, menyusun RPP, menyelesaikan administrasi proses pembelajaran sehingga jadi terbelengkalai dan menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pemberian kebijakan dana BOS terhadap kinerja guru bersertifikasi di suatu madrasah. Penelitian dilaksanakan di Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun yang merupakan madrasah swasta dibawah naungan Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) beralamat di Blok Sandrem Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kab. Indramayu.

Fakta dilapangan yang peneliti temui, berkaitan dengan guru bersertifikasi di MA Ma'had Al-Zaytun beberapa diantaranya adalah:

1. Seluruh guru sertifikasi wajib memiliki kelengkapan administrasi seperti RPP, agenda guru dan daftar nilai siswa.
2. Seluruh guru sertifikasi yang bertugas, wajib tiba di madrasah selambatnya pukul 06.30 waktu setempat
3. Seluruh guru sertifikasi wajib mengikuti persiapan pembelajaran setiap hari Senin sampai Sabtu pada pukul 06.40 waktu setempat tanpa ada keterlambatan.
4. Seluruh guru sertifikasi wajib masuk ke dalam kelas tanpa keterlambatan dan mengakhiri pembelajaran sesuai waktu yang ditetapkan.

5. Seluruh guru sertifikasi yang ditugaskan menjadi wali kelas, wajib mendampingi kegiatan ekstrakurikuler siswa di luar jam pembelajaran di kelas.
6. Seluruh guru wajib meningkatkan kompetensi pendidikannya untuk melanjutkan ke Strata 2 maupun Strata 3. Dari 70 guru sertifikasi, 40 orang sudah lulus S2, 15 orang diantaranya sedang menjalani perkuliahan S2 dan 15 orang masih S1 (Ma'had Al-Zaytun, 2022).

Data awal yang diperoleh peneliti menunjukkan terdapat beberapa indikator kebijakan dana BOS yang tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja guru bersertifikasi di MA Ma'had Al-Zaytun, yaitu:

1. Guru bersertifikasi di MA Ma'had Al-Zaytun tidak menerima honor yang dianggarkan dari dana BOS.
2. Guru bersertifikasi di MA Ma'had Al-Zaytun meningkatkan kompetensi pendidikan mereka dari anggaran di luar dana BOS yang diterima oleh madrasah.
3. Guru bersertifikasi di MA Ma'had Al-Zaytun menerima tunjangan profesi yang dibayarkan secara tidak rutin setiap bulan. Tunjangan profesi guru (tunjangan sertifikasi) dicairkan tidak rutin setiap bulan, adakalanya pembayaran di rapel dalam 2 atau 3 bulan.

Berdasarkan fenomena tersebut maka dugaan sementara dari penelitian ini bahwa adanya kebijakan pemberian dana BOS tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja guru bersertifikasi di MA Ma'hadd Al-Zaytun. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian di madrasah tersebut dan menggali informasi faktor apa yang mempengaruhi kinerja para guru bersertifikasi di MA Ma'had Al-Zaytun. Dalam hal ini peneliti mengangkat judul "Pengaruh Kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Kinerja Guru Bersertifikasi di MA Ma'had Al-Zaytun, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu".

### Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, analisis statistik pengaruh antara variabel. Dalam penelitian survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner dan pengumpulan data sekunder yang relevan. Pada umumnya penelitian survei dibatasi oleh penelitian yang datanya terkumpul dari sampel atas usatu populasi guna mewakili seluruh populasi. Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui pengaruh dari variabel-variabel yang diteliti, yaitu pengaruh kebijakan pemberian dana BOS terhadap kinerja guru bersertifikasi di MA Ma'had Al-Zaytun Kecamatan Gantar Indramayu.

Populasi dalam penelitian ini yaitu guru yang sudah bersertifikasi di MA Ma'had Al-Zaytun, sejumlah 70 orang. Jumlah sampel diambil sebanyak 40 (empat puluh) orang dengan menggunakan rumus Slovin yang diambil dengan secara acak sederhana (*simple random sampling*). Pendekatan secara random didasarkan kepada karakteristik populasi yang relatif homogen yakni guru yang sudah mendapatkan sertifikasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif. Metode deskriptif yaitu mentabulasikan data dalam bentuk tabel-tabel distribusi frekuensi. Data pada tabel frekuensi kemudian diinterpretasikan dan disikapi secara deskripsi dan pembuktian proposisi menjadi fakta.

Langkah-langkah dalam melakukan menguji hipotesis dimulai dengan menetapkan hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ), pemilihan tes statistik dan perhitungannya, menetapkan tingkat signifikansi dan penetapan kriteria pengujian.

Kesimpulan sementara bagaimana pengaruh variabel Implementasi Kebijakan pemberian dana BOS (X) terhadap variabel Kinerja Guru bersertifikasi (Y) dalam penulisan hipotesis penelitian ini yaitu:

$H_0$  = Tidak ada pengaruh signifikan antara pemberian dana BOS terhadap kinerja guru bersertifikasi di MA Ma'had Al-Zaytun, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu

$H_a$  = Ada pengaruh signifikan antara pemberian dana BOS terhadap kinerja guru bersertifikasi di MA Ma'had Al-Zaytun, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu

Uji t digunakan untuk menguji rata nilai sebuah sampel dengan nilai lainnya, selain itu Uji t bisa juga untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel independen.

1. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat ( $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak)
2. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat ( $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima)

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan suatu koefisien yang menunjukkan persentase adanya pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasinya maka semakin baik variabel dependen menjelaskan variabel independennya.

### Hasil dan Pembahasan

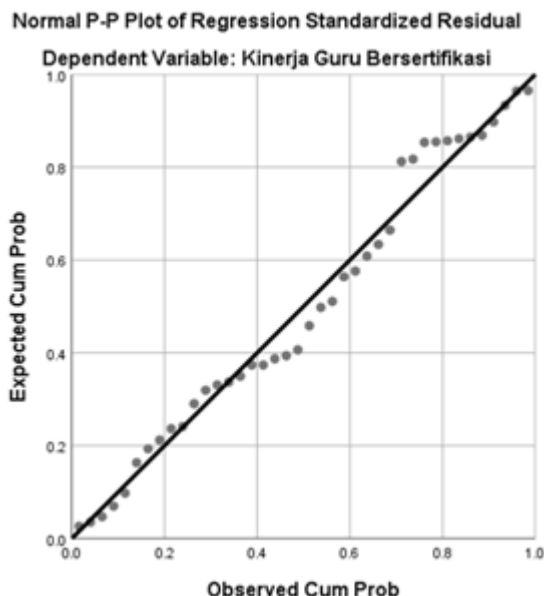
Berdasarkan tabel uji normalitas data, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi memiliki nilai 0,196 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual dari kedua variabel kebijakan pemberian dana BOS dan kinerja guru bersertifikasi berdistribusi normal.

**Tabel 1. Tabel Uji Normalitas Data**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	397638182,00000000
Most Extreme Differences	Absolute	.115
	Positive	.095
	Negative	-.115
Test Statistic		.115
Asymp. Sig. (2-tailed)		.196 <sup>c</sup>

a Test distribution is Normal.  
 b Calculated from data.  
 c Lilliefors Significance Correction.

Hal ini dapat dilihat pada gambar, dimana titik-titik yang mewakili data hasil penelitian tersebar di sekitar garis normal dan mengikuti arah garis tersebut.



**Gambar 1. Uji Normalitas Data**

Sumber: Hasil SPSS V.25

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana, dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut;  $Y = 42,206 + 0,133X$ . Hal ini berarti bahwa Variabel Kebijakan Pemberian Dana BOS (X) mempengaruhi secara signifikan terhadap Variabel Kinerja Guru Bersertifikasi (Y) dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Dengan nilai koefisien sebesar 0,133 menunjukkan bahwa jika pemberian dana BOS meningkat sebesar Rp 1,- akan memberikan pengaruh terhadap kinerja guru bersertifikasi sebesar 0,133 dengan asumsi bahwa variabel lainnya bersifat konstan.

**Tabel 2. Tabel Regresi Linier Sederhana**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VF
1	(Constant)	42,206	6,610		6,386	0,000		
	Kebijakan Pemberian Dana	0,133	0,063	0,322	2,097	0,043	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Kinerja Guru Bersertifikasi

Sedangkan berdasarkan uji T, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh kebijakan pemberian dana BOS (Variabel X) adalah sebesar 0,043. Nilai ini lebih kecil dari nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima yang berarti terdapat pengaruh kebijakan pemberian dana BOS terhadap kinerja guru bersertifikasi di MA Ma'had Al-Zaytun (Y).

**Table 3. Tabel Uji T**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1.	(Constant)	42,206	6,610		6,386	0,000
	Kebijakan Pemberian Dana BOS	0,133	0,063	0,322	2,097	0,043

a. Dependent Variable: Kinerja Guru Bersertifikasi

Sumber: Hasil SPSS V.25

Arah koefisien regresi positif berarti bahwa kebijakan pemberian dana BOS memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja guru berprestasi. Semakin tinggi kebijakan pemberian dana BOS yang diberikan akan semakin tinggi pula kinerja guru berprestasi di MA Ma'had Al-Zaytun.

Ditinjau dari uji determinasi (R<sup>2</sup>), Variabel kebijakan pemberian dana BOS memberikan pengaruh terhadap kinerja guru bersertifikasi sebesar 10,4%. Ada 89,6% dari faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini dan mempengaruhi kinerja guru bersertifikasi, di luar dari variabel kebijakan pemberian dana BOS.

**Tabel 4. Tabel R Square**

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1.	.322 <sup>a</sup>	0,104	0,080	4,028	0,104	4,397	1	38	0,043

a. Predictors: (Constant), Kebijakan Pemberian Dana BOS

Sumber: Hasil SPSS V. 25

A. Tabrani Rusyan dkk. (2000:17) mengemukakan bahwa kinerja guru merupakan proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di dalam ataupun di luar kelas, di samping melakukan kegiatan lainnya, seperti mengerjakan administrasi sekolah, administrasi pembelajaran, bimbingan dan layanan pada siswa serta melakukan penilaian. Guru harus memiliki kinerja yang baik agar kegiatan belajar berjalan optimal. Semakin besar kinerja yang dimiliki, semakin banyak tugas yang terpenuhi.

Menurut Mulyasa dalam Nurrochmah & Sontani (2020:22) bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja guru yaitu:

1. Sikap mental berupa motivasi, disiplin dan etika
2. Tingkat pendidikan
3. Keterampilan
4. Manajemen atau gaya kepemimpinan kepala sekolah
5. Hubungan industrial
6. Tingkat penghasilan yang memadai
7. Kesehatan
8. Jaminan sosial yang diberikan dinas pendidikan kepada pendidik untuk meningkatkan pengabdian dan semangat kerjanya
9. Lingkungan sosial dan suasana kerja yang baik
10. Kualitas sarana pembelajaran yang menunjang pembelajaran

Berdasarkan penelitian, kinerja guru bersertifikasi di MA Ma'had Al-Zaytun masuk dalam kategori berkinerja sedang. Hal ini dapat dilihat dari tabel 15 tentang kecenderungan

kinerja guru bersertifikasi yang memiliki nilai terbesar pada skor kategori sedang. Artinya, meskipun guru bersertifikasi tidak menerima honor yang dianggarkan dari dana BOS, para guru masih dapat menikmati manfaat dana BOS untuk kegiatan lain dalam proses belajar mengajar, kualitas sarana pembelajaran yang menunjang, lingkungan yang sehat dan aman, kesempatan meningkatkan keterampilan melalui pelatihan yang dianggarkan dari dana BOS.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan kepada 40 orang responden, rata-rata para responden menyatakan bahwa kebijakan pemberian dana BOS mempengaruhi kinerja guru bersertifikasi di MA Ma'had Al-Zaytun kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu terdapat pengaruh signifikan antara variabel kebijakan pemberian dana BOS terhadap kinerja guru bersertifikasi di MA Ma'had Al-Zaytun kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu. Hal ini dibuktikan berdasarkan uji regresi linier sederhana yang menghasilkan persamaan  $Y = 42,206 + 0,133X$ , yang berarti setiap kenaikan Rp. 1,- dari kebijakan dana BOS akan mempengaruhi kenaikan kinerja sebesar 0,133 point.

$H_0$  yang menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan bahwa kebijakan pemberian dana BOS mempengaruhi kinerja guru bersertifikasi di MA Ma'had Al-Zaytun, pernyataan ini diterima berdasarkan uji T dari penelitian yang dilakukan. Variabel kebijakan pemberian dana BOS mempengaruhi sebesar 10,4% terhadap kinerja guru bersertifikasi di MA Ma'had Al-Zaytun. Dan sebesar 89,6% faktor lain yang mempengaruhi kinerja guru berprestasi tidak diteliti dalam penelitian ini.

Anggaran dana BOS yang dapat dimanfaatkan oleh para guru bersertifikasi di MA Ma'had Al-Zaytun adalah kondisi sarana prasarana pembelajaran cukup lengkap dan memadai, kesempatan untuk meningkatkan keterampilan melalui pelatihan yang dananya dianggarkan dari dana BOS, dana BOS digunakan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, madrasah menyediakan anggaran untuk kelengkapan administrasi pembelajaran yang harus dipenuhi oleh seluruh guru.

### Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Armaiyyetti, R., Marsidin, S., & Alkadri, H. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Dana Bos terhadap Prestasi Guru. *Jurnal Basicedu*, 4(2), 453-459.
- Aspansius. (2010). *Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Mengengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak*. Jakarta.
- Ayunda, G. (2017). *Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru PAI Di SD Integral Luqman Al Hakim Mataram*. Mataram.
- Dunn, W. N (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edison, E., Anwar, Y., & Komariyah, I. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Fauzi, H. L. (2021). Pengaruh Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Mutu Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya. *JEpa*, 6(2), 472-481.



- Hakim, J. J. (2020). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru Terhadap Kinerja Guru SMP Negeri se-Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya*. Tasikmalaya.
- Haarjani, S. (2012). *Pengaruh Akuntabilitas dan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah terhadap Persepsi Stakholder SMP Negeri Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau*.
- Hidayat, M. T., Siswoyo, M., Rosnidah, I., Permana, I. & Zulkarnaen, I. (2021). *Pedoman Penulisan Tesis Magister Administrasi Publik*. Cirebon: Deepublish.
- Kahmad, D. (2015). *Manajemen Organisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kristianus. (2011). *Analisis implementasi program bantuan operasional sekolah (BOS) di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Studi Kasus: SDN 07 Lubuk Nibung*.
- Lubis, M. S. (2007). *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Ningsih, D. Y. (2020). *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Profesionalisme Guru Terhadap Kinerja Guru di SMK Negeri 4 Metro*. Lampung.
- Nugraha, Y. S. S. (2020). Implementasi Kebijakan Bos dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SDN Babakan Kadu Kota Tasikmalaya. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1(3), 211-215.
- Permana, I. (2023). *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Permana, I. (2023). *Buku Ajar Pengertian Dasar Administrasi Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pramusinto, A. (2014). *Mozaik Kebijakan Publik di Indonesia 2014*. Yogyakarta: Institute of Governance and Publik Affairs (IGPA) MAP Universitas Gadjah Mada.
- Prayitno, A. (2019). *Rudiyanto, Strategi Bersaing dalam Perspektif Militer dan Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Rizal, M. T. (2017). *Pengaruh Motivasi dan Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Cirebon)*.
- Rizkiyanto, A. (2016). *Pengaruh Penerapan Pelayanan Prima (Implementasi of Service Excellent) terhadap Kinerja Pegawai di PDAM Tirtajati Kabupaten Cirebon*. Cirebon
- Santosa, P. (2008). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Siswoyo, M., Permana, I., Hidayat, M. S., & Sutrisno, E. (2019, March). Government Policy on Additional Income to Civil Servants. In *International Symposium on Social Sciences, Education, and Humanities (ISSEH 2018)* (pp. 80-82). Atlantis Press.
- Sulfemi, W. B. (2020). Pengaruh rasa percaya diri dan gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 157-179.
- Sumarni, S. (2021). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru Pada SMP Negeri Kota Pekanbaru* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).

- Susilawati, S., Permana, I., & Hidayat, M. T. (2014). Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Kompetensi Guru SMP Negeri di Kecamatan Jatiwangi. *Jurnal Ilmiah Publika*, 2(2).
- Susmiyati, S., & Zurqoni, Z. (2020). Memotret Kinerja Guru Madrasah Dalam Pembelajaran. *Southeast Asian Journal of Islamic Education*, 2(2), 143-169.
- Suwarno, T. (2021). *Pengaruh Peran Komite Sekolah Dan Manajemen Dana Bos Terhadap Kinerja Guru Serta Implikasinya Terhadap Mutu Pendidikan Pada Madrasah Swasta Di Kecamatan Pulau Rimau* (Doctoral dissertation, 021008 Universitas Tridinanti Palembang).
- Suzan, N. (2022). *Pengaruh Motivasi dan Pelatihan Kerja terhadap Peningkatan Kompetensi dan Kinerja Guru pada Sekolah Swasta "AAA" Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Tarom, M. (2019). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Manajemen Sekolah Terhadap Kinerja Pembelajaran Guru Sekolah Dasar Dalam Meningkatkan Mutu dan Hasil Belajar di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang*.
- Waliyah, S., Dini, S. H., & Syarif, A. (2021). Manajemen pembiayaan pendidikan masa pandemi Covid-19 di SMK Gazza Wiguna 1. *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 77-98.
- Zainal, V. R., Ramly, H. M., Mutis, T., & Arafah, W. (2019). *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan dari teori ke praktik*. Depok: RajaGrafindo Persada.